

**ANALISIS KINERJA ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DEMAK
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Kiki Hardiyanti, Dra. Ari Subowo, MA

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7475407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang tidak luput mengalami masalah sampah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak merupakan suatu dinas yang bertanggung jawab menangani lingkungan, salah satunya yaitu pengelolaan sampah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Indikator yang digunakan untuk menilai kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Penilaian kinerja juga dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas kinerja dalam pengelolaan sampah belum maksimal karena keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta upaya yang belum tepat. Kualitas layanan masih belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi. Responsivitas tidak maksimal karena tidak adanya sarana maupun kegiatan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Responsibilitas belum maksimal karena masih berfokus pada TPA Kalikondang dan pemenuhan sarana prasarana di kota, serta tidak adanya transparansi kepada masyarakat. Kepemimpinan dan tim merupakan faktor pendorong, sedangkan faktor penghambat meliputi kurangnya sumber daya manusia, keterbatasan dana, dan kekurangan sarana dan prasarana. Rekomendasi peneliti adalah dengan melakukan upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja, peningkatan sarana dan prasarana, serta mengikutsertakan masyarakat.

Kata Kunci: Kinerja, Kepemimpinan, Sumberdaya

PERFORMANCE ORGANIZATION ANALYSIS OF DEMAK ENVIRONMENTAL AGENCY IN WASTE MANAGEMENT

ABSTRACT

Demak Regency is one of the districts in Central Java that is developing and is not spared experiencing waste problems. The Department of Environment Demak Regency is an agency responsible for handling the environment, one of which is waste management. The purpose of this study is to analyze and describe the performance of the environmental agency of Demak in waste management. The methods used in this research is descriptive qualitative. Indicators are used to assess performance are productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. In addition, the assessment of performance seen from the driving factor and a barrier to the performance of the organization. The results of this research show that the productivity performance in waste management has not been fullest because of limited human resources, facilities and infrastructure and the efforts that have not been right. Quality of service is still not optimally and needs to be increased again. Responsiveness is not optimal because there are no facilities or activities to determine the community needs. Responsibility is not maximal because it is still only focused on the Kalikondang landfill and the fulfillment of infrastructure in the city, as well as the lack of transparency to the public. Leadership and team is the driving factor, while restricting factors include a lack of human resources, limitation of funds, and a shortage of facilities and infrastructure. The researcher's recommendation is to do a strategic effort in optimizing performance, improvement of facilities and infrastructure, as well as involve community.

Keywords: Performance, Leadership, Resources

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu permasalahan yang dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia adalah sampah. Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten/kota di Jawa Tengah yang sedang berkembang dan tidak luput mengalami masalah ini.

Permasalahan mengenai sampah pada umumnya bersumber

pada penempatan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah, khususnya TPS sampah yang belum tepat. TPS sampah merupakan suatu penampungan sampah dari sumber sampah sebelum diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Pemilihan lokasi TPS sampah pada dasarnya harus ditetapkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus, supaya TPS

sampah yang ditetapkan tidak mengganggu aktivitas penduduk maupun kondisi lingkungan sekitarnya (Wijiastuti, 2012).

TPS sampah Kabupaten Demak menurut data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 berjumlah 35 yang terletak di lima kecamatan. Kabupaten Demak memiliki 14 kecamatan, namun hanya lima kecamatan yang memiliki TPS sampah yaitu 28 TPS sampah di Kecamatan Demak, 2 TPS sampah di Kecamatan Wonosalam, 1 TPS sampah di Kecamatan Karangtengah, 3 TPS sampah di Kecamatan Sayung dan 1 TPS sampah di Kecamatan Mranggen. Masih ada tiga TPS sampah yang belum aktif, yaitu 1 di Kecamatan Karangtengah, 1 di Kecamatan Sayung, 1 di Kecamatan Demak, dan ke 35 TPS sampah tersebut masih bersifat bak sampah terbuka. TPS sampah yang sudah tersedia tersebut lebih dipusatkan pada pusat kota dan perumahan.

Sejak tahun 1980-an dalam Desmawan (2012:2) bahwa Kabupaten Demak menjadi salah satu daerah yang terkena banjir rob.

Bencana tersebut menggenangi empat kecamatan yang berbatasan langsung dengan Pesisir Demak yaitu Kecamatan Sayung, Karang Tengah, Wedung dan Bonang. Sedangkan jangkauan pelayanan pengelolaan sampah masih terbatas pada jalan-jalan utama, kawasan perkotaan, pasar, dan pada daerah permukiman masih belum terjangkau. Sehingga keadaan tersebut semakin diperparah dengan sampah-sampah yang dibuang sembarangan atau tidak pada tempatnya, kemudian sampah tersebut terbawa aliran banjir dan ikut tergenang.

Permasalahan lainnya yaitu Kabupaten Demak memiliki dua Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yaitu TPA Kalikondang dan TPA Candisari yang masih *open dumping*. *Open Dumping* menurut Mubarak (2009:280) merupakan suatu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka sehingga menimbulkan masalah. Pada lahan penimbunan terbuka, berbagai macam hama dan kuman penyebab penyakit dapat berkembang biak.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menggali informasi

mengenai kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah?

C. Kajian Teori

1. Administrasi publik

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dan mengalami pergeseran paradigma. Administrasi publik menurut Chandler dan Plano dalam Keban (2014:4) adalah proses sumberdaya dan personel publik yang diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan didalam kebijakan publik. Administrasi publik

dapat disimpulkan sebagai kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang melingkupi personil publik dan segala kegiatan yang mengatur hubungan terjadinya penyelenggaraan urusan publik.

2. Manajemen Publik

Overman dalam Keban (2014:92-93) mendefinisikan manajemen publik merupakan suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan hal itu merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning, organizing* dan *controlling* di satu sisi, dan melihat sisi lain seperti sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi dan politik di sisi lain. Overman menekankan manajemen sebagai sebuah proses untuk menggerakkan sumber daya yang ada dan melaksanakannya sesuai dengan apa yang diminta oleh kebijakan publik.

3. Kinerja Organisasi

Kinerja organisasi dalam Mahsun (2006:25) mendefinisikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kebijakan/program/kegiatan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran organisasi sesuai dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam *strategis planning* suatu organisasi.

a. Indikator Kinerja

Indikator yang perlu digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014:16), antara lain yaitu :

- 1) Produktivitas, diukur dari tingkat efisiensi dan efektivitas pelayanan. Pada umumnya produktivitas digunakan sebagai rasio antara *input* dan *output*;
- 2) Kualitas Layanan, diukur dari kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan;
- 3) Responsivitas, diukur dari kemampuan birokrasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, terutama dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- 4) Responsibilitas, menjelaskan mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan birokrasi;
- 5) Akuntabilitas, merupakan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh

rakyat. Akuntabilitas publik digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik konsisten dan sesuai dengan kehendak publik.

Pengukuran kinerja dilihat dari *input* dan *output* yang terdapat pada Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Tahun 2009 Tentang Pengukuran Kinerja, dimana *input* yaitu mengukur jumlah sumber daya yang dipergunakan seperti anggaran, sumber daya manusia, peralatan, materil dan masukan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan, sedangkan *output* yaitu digunakan untuk mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu pelaksanaan kegiatan berupa fisik dan nonfisik.

Kualitas layanan menurut Ziethaml dalam Hardiansyah (2011:46) memiliki indikator yaitu:

- 1) Bukti fisik yang terdiri dari fasilitas fisik berupa gedung, perlengkapan yang dipergunakan serta penampilan pegawai;
- 2) Keandalan, seperti kemampuan pegawai untuk memberikan pelayanan dan kemampuan untuk

bisa dipercaya dalam memberikan jasa tepat waktu;

- 3) Jaminan, seperti pengetahuan, kesopansantunan dan kemampuan pegawai dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan;
- 4) Empati, seperti memberikan perhatian secara individu kepada pelanggan dengan berupaya memahami konsumen;
- 5) Daya tanggap, seperti kemampuan karyawan membantu para pelanggan dengan sigap dan tanggap.

Indikator responsivitas menurut Dwiyanto dalam Setianingrum (2016:5) dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Ada tidaknya pengaduan dari masyarakat;
- 2) Sikap aparat birokrasi dalam merespon pengaduan dari masyarakat;
- 3) Penggunaan pengaduan dari masyarakat sebagai referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pelayanan pada masa mendatang;
- 4) Berbagai tindakan aparat birokrasi untuk memberikan kepuasan pelayanan kepada masyarakat;

Responsibilitas menurut Nasution (2007:152) dapat dilihat dari tanggung jawab dan kerjasama yang dilakukan antara perusahaan maupun *stakeholder*.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dalam Mahmudi (2015:20) adalah:

- 1) Faktor personal/individual meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu;
- 2) Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan *team leader*;
- 3) Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim;
- 4) Faktor sistem meliputi meliputi sistem kerja fasilitas kerja, infrastruktur yang diberikan

organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam organisasi;

- 5) Faktor kontekstual (situasional) meliputi tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

D. Metode penelitian

Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi, dan studi kepustakaan. Informan penelitian adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak, Kepala Seksi Kebersihan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak, dan Koordinator Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kalikondang Kabupaten Demak. Pengujian data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah

a. Produktivitas

Produktivitas menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014:16) merupakan suatu indikator untuk melihat kinerja pada suatu organisasi yang pada umumnya digunakan sebagai rasio antara *input* dan *output* untuk mengukur efisiensi dan efektivitas pelayanan.

Hasil yang peneliti peroleh bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah belum maksimal karena terdapat kendala yang terjadi dalam melaksanakan kegiatan seperti keterbatasan sarana dan prasarana sampah masih perpusat di Kota Demak, sampah yang masuk ke TPA Kalikondang seharusnya sebelum dibuang dicacah dahulu melalui dua mesin pencacah sampah namun sampah yang masuk langsung dibuang, penimbunan tanah diatas timbunan sampah dilaksanakan oleh dua bego setiap dua minggu sekali. Selain itu, air lindi yang dibuang belum melalui pengelolaan sempurna karena masih pada tahap kincir air dikolam kedua. Namun, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak melakukan upaya-upaya untuk

meningkatkan kinerja terkait kendala yang terjadi yaitu tetap melaksanakan dan mengusahakan pengelolaan dengan keterbatasan alat, sarana dan prasarana, serta adanya rencana pemindahan TPA ke Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung pada tahun 2020 dengan luas 8.8 ha dari TPA yang sebelumnya TPA Kalikondang seluas 2.5 ha dan TPA Candisari seluas 0.16 ha dengan harapan tempat yang lebih luas sehingga pengelolaan yang dilakukan juga bisa dalam skala besar.

b. Kualitas Layanan

Kualitas layanan menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014:16) suatu hal yang cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik.

Kualitas layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan berbentuk fisik yang dilakukan masih belum maksimal, karena pengadaan TPS sampah dari 14 kecamatan di Kabupaten Demak hanya 5 kecamatan yang terdapat TPS sampah yaitu 28 TPS sampah terletak di Kecamatan

Demak, 2 TPS sampah di Kecamatan Wonosalam, 1 TPS sampah di Kecamatan Karangtengah, 3 TPS sampah di Kecamatan Sayung, dan 1 TPS sampah di Kecamatan Mranggen. Armada pengangkutan berjumlah 22 yang dalam pelaksanaan tugasnya belum maksimal, karena masih terdapat pengaduan mengenai keterlambatan pengangkutan sampah, Pengelolaan di TPA Kalikondang dan TPA Candisari masih menggunakan sistem *open dumping* dan *over capacity*. Namun, TPA Kalikondang sudah terdapat pengelolaan salah satunya yaitu Pupuk Kompos TPA Kalikondang yang dijual Rp3.000,00/kg. TPA Kalikondang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mengenai pembuatan pupuk kompos sudah maksimal, karena kesanggupan untuk memenuhi permintaan masyarakat.

c. Responsivitas

Responsivitas menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014:16) merupakan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, prioritas pelayanan, mengembangkan program-program

pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat.

Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak belum memadai karena tidak adanya kegiatan untuk menggali atau mengetahui kebutuhan masyarakat terkait pengaduan pengelolaan sampah, melainkan masyarakat menemui langsung pegawai atau menghubungi melalui telpon atau *chat* di *WhatsApp* untuk menyampaikan keluhan terkait dengan pengelolaan sampah. Sikap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak untuk menindaklanjuti pengaduan sudah tanggap dalam menjawab keluhan masyarakat yang disampaikan melalui pengaduan dan berusaha untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat itu juga, jika permasalahan tersebut berhubungan dengan warga maka pihak dari dinas langsung menemui pihak yang bersangkutan untuk mencari jalan keluar terbaik, sedangkan terkait masalah keterlambatan pengangkutan sampah di TPS sampah mengupayakan armada untuk dapat mengangkut di hari yang sama.

d. Responsibilitas

Responsivitas menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014:16) merupakan suatu hal yang menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar sesuai dengan kebijakan birokrasi.

Responsivitas dilihat dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah sudah maksimal dilihat dari koordinasi yang dilakukan dengan Seksi Kebersihan DINPERKIM Kabupaten Demak terkait armada karena tidak ada kendala yang terjadi dalam melakukan komando, koordinasi dan pelaksanaan. Tanggung jawab DLH dalam melakukan pengelolaan di TPA masih belum maksimal karena semua sampah yang masuk ke TPA Kalikondang sebagian besar dibuang, padahal semua sampah yang masuk seharusnya dicacah terlebih dahulu. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tidak menjalin kerja sama dengan *stakeholder*. Selain itu, penyusunan agenda dan penetapan prioritas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan

berfokus pada TPA Kalikondang dan pemenuhan sarana dan prasarana di pusat kota Demak.

e. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Dwiyanto dalam Sudarmanto (2014:16) merupakan seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat.

Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak yang dilakukan dalam pengelolaan sampah yaitu berupa bentuk pertanggung jawaban berbentuk buku laporan dari rekapan hasil laporan kegiatan pengelolaan sampah setiap bulannya yang kemudian dijilid pertiga bulan dan kemudian diserahkan kepada Kepala Bidang Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Keracunan dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan TPA Kalikondang adalah membuat buku yang didalamnya meliputi sampah yang masuk perhari, sampah yang diolah dan sampah yang langsung

dibuang. Laporan tersebut berupa buku laporan yang dijilid setiap bulannya kemudian didiseraikan kepada Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak. Sedangkan pertanggung jawaban armada pengangkutan berupa nota pembelian bahan bakar minyak (BBM) yangdiseraikan setiap harinya ke bendahara. Selain itu, mengenai transparansi dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tidak ada karena tidak memiliki *website* resmi maupun media sosial lainnya dan belum adanya transparansi mengenai anggaran.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah

a. Personal

Faktor personal yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah belum maksimal jika dilihat dari kualitas sumber daya manusia, kualitas pengetahuan dan kemampuan pegawai, dan komitmen pegawai dalam melaksanakan tugas karena

terdapat kendala seperti keterbatasan alat dan kekurangan pegawai.

b. Kepemimpinan

Pemimpin di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaannya sudah maksimal. Hal tersebut terlihat dari pemimpin sudah memberikan motivasi dan arahan dalam pelaksanaan tugas sehingga masing-masing pegawai paham dan mengerti mengenai tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan. Pemimpin juga selalu menghargai segala usaha dan upaya yang dilakukan pegawai dengan mengucapkan terimakasih karena telah membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dan pemimpin melibatkan bawahan atau pegawainya dalam proses pengambilan keputusan seperti menerima masukan berupa kritik maupun saran yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

c. Tim

faktor tim yang meliputi dukungan dan koordinasi antar-pegawai sudah berjalan dengan baik dan mendukung kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah, namun masih terdapat

kendala ketika petugas armada pengangkutan sampah berhalangan hadir dan tidak ada pegawai yang bisa membantu untuk *memback-up* pengangkutan sampah, namun jika petugas armada ada yang bisa membantu untuk mengangkut sampah maka tidak menjadi masalah.

d. Sistem

faktor sistem yang meliputi mekanisme sistem kerja, sarana dan prasarana masih belum maksimal, karena masih terdapat kendala yaitu kurangnya pegawai dan alat sehingga pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, sarana dan prasarana seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah dan tempat sampah kecil masih terfokus di Kota Demak, sehingga perlu ditingkatkan lagi supaya tidak menghambat kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dalam pengelolaan sampah.

e. Kontekstual

Faktor kontekstual Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah tidak begitu terpengaruh terhadap perubahan yang

terjadi di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Selain itu, tekanan dari internal maupun eksternal organisasi tidak mempengaruhi terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah karena apapun yang terjadi disekeliling Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah tidak dijadikan beban dan pelaksanaan tugas dilakukan sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang berlaku.

Kesimpulan dan Saran

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal. Hal tersebut dilihat dari indikator produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggungjawab dan akuntabilitas sebagai berikut:

1) Produktivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal karena masih terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta air lindi yang

dibuang ke kali belum memenuhi standar yang telah ditetapkan sehingga masih mencemari lingkungan;

2) Kualitas layanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah belum maksimal dilihat dari bentuk fisik berupa sarana dan prasarana yang bpusat di Kota Demak dan kekurangan pegawai. Namun, pelayanan pembuatan pupuk kompos sudah memadai karena kesanggupan TPA Kalikondang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat;

3) Responsivitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak belum memadai karena tidak adanya kegiatan untuk menggali atau mengetahui kebutuhan masyarakat terkait pengaduan pengelolaan sampah. Sikap Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sudah tanggap, namun belum mampu memberi solusi yang tepat seperti tanggul tanah yang digunakan untuk menghalangi air lindi mengenai persawahan masyarakat disekitar TPA Kalikondang. Selain itu, masalah keterlambatan

pengangkutan sampah di TPS sampah armada berusaha mengupayakan untuk dapat mengangkut di hari yang sama atau besok.

- 4) **Responsibilitas Dinas Lingkungan Hidup** dalam pengelolaan sampah belum maksimal dilihat dari tanggungjawabnya karena dalam pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan standar operasinalisasi kegiatan yang telah ditetapkan. Penyusunan agenda dan penetapan prioritas berfokus pada TPA Kalikondang dan pemenuhan sarana dan prasarana di pusat kota Demak. Selain itu, tidak ada kerja sama dengan *stakeholder*.
- 5) **Akuntabilitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak** yang dilakukan dalam pengelolaan sampah masih belum maksimal karena tidak adanya bentuk transparansi seperti *website* resmi maupun media sosial lainnya.

Selain itu, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam Pengelolaan Sampah digunakan untuk melihat faktor pendorong dan

penghambat kinerja organisasi sebagai berikut:

a. **Faktor Pendorong**

1) **Kepemimpinan**

Adanya motivasi dan arahan dalam sehingga masing-masing pegawai semangat dan mengerti mengenai tugas pokok dan fungsi yang harus dilakukan. Selain itu, adanya penghargaan terhadap segala usaha dan upaya yang dilakukan pegawai dengan mengucapkan terimakasih dan keterlibatan bawahan atau pegawainya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah menerima masukan seperti kritik maupun saran.

b. **Faktor Penghambat**

1) **Personal**

Kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, kemampuan dan komitmen pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak sudah mumpuni, namun masih terdapat kendala yang terjadi yaitu keterbatasan alat dan kekurangan pegawai.

2) **Tim**

Adanya kendala ketika petugas armada pengangkutan sampah berhalangan hadir dan tidak ada pegawai yang bisa untuk *memback-*

up karena keterbatasan pegawai, namun jika ada pegawai armada yang bisa membantu maka tidak menjadi masalah.

3) Sistem

Keterbatasan dana, kurangnya pegawai dan alat sehingga pelaksanaan tugas tidak sesuai dengan standar operasional kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu, sarana dan prasarana seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah dan tempat sampah kecil masih terfokus di Kota Demak.

4) Kontekstual

Perubahan dan tekanan yang terjadi di dalam lingkungan internal dan eksternal tidak mempengaruhi terhadap Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah.

b. Saran

- 1) Untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah perlu adanya upaya strategis dalam mengoptimalkan kinerja dengan tujuan supaya program kegiatan dapat dilakukan secara optimal;
- 2) Untuk mengatasi kekurangan pegawai atau sumber daya manusia,

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah perlu mengadakan penerimaan pegawai honorer dengan menyesuaikan anggaran yang ada. Selain itu, perlu mengadakan pelatihan untuk mengoptimalkan kemampuan sumber daya yang ada;

- 3) Perlu adanya kesamarataan dalam pemberian sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah sehingga tidak hanya berpusat di sekitaran Kota Demak. Selain itu, mengadakan tindak lanjut terhadap sosialisasi yang diberikan mengenai pengelolaan sampah;
- 4) Mengikutsertakan atau menjalin kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dengan masyarakat dalam pengelolaan sampah sehingga tercipta kesinergisan dalam menjaga lingkungan;
- 5) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak dalam pengelolaan sampah hendaknya perlu memperhatikan perubahan maupun tekanan yang terjadi

dilingkungan internal dan eksternal organisasi sebagai penyemangat atau perbaikan kinerja serta dapat mengikuti perkembangan tuntutan atau kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hardiansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta.
- Keban, T. Yeremias. 2014. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahsun, Muhammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : FE UGM.
- Mubarak, Wahid Iqbal dan Nurul C. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi*. Bandung : *Book Terrace dan Library*.
- Sudarmanto. 2014. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Desmawan, Bayu Trisna. 2012. *Adaptasi Masyarakat Kawasan Pesisir terhadap Banjir Rob di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah*. 1(1):2.
- Setianingrum, Triyastuti dan Yam'ah Tsalatsa. 2016. *Mempertanyakan Responsvitas Pelayanan Publik Pada Pengelolaan Pengaduan Kasus UPIK di Kota Yogyakarta*. 24(1):5
- Wijiastuti, Ririn. 2012. *Tempat Penampungan Sementara (TPS) Sampah di Kecamatan Jebres Tahun 2012*. Jurnal Skripsi.
- Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Tahun 2009 Tentang Pengukuran Kinerja.
- Data Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Demak Tahun 2018 Tentang TPS sampah